

P E N G A N T A R

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bolaang Mongondow Utara sebagai penjabaran Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang sedang dilaksanakan pada tahun 2024 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja Perubahan dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan.



Kepala Kantor,

Ramin Buhang, S.Sos

Nip. 19690830 199203 1 007

DAFTAR ISI

	Pengantar
	Daftar isi
BAB 1	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
	2.1 Tabel
	2.2 Tabel
	2.3 Tabel
	3.4 Tabel
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1 Tabel
BAB IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat pergeseran, penghapusan, penambahan kegiatan dan atau penambahan dan pengurangan target kinerja program dan kegiatan berdasarkan perubahan Target RKP.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang di rumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisten Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaporan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPD Organisasi perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Cara Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Cara Penyusunan rencana pembangunan nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan adalah :

1. Sebagai arah kebijakan strategis pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun program dan kegiatan;
2. Sebagai landasan dalam merumuskan program-program strategis dan prioritas yang berbasis sumberdaya lokal;
3. Sebagai tolak ukur dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan serta mengevaluasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tujuan penyusunan renja adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan pelaksanaan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam rangka memperkuat potensi sumber daya yang dimiliki;
2. Tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terintegrasi dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 **Sistematika Penulisan.**

DAFTAR ISI

	Pengantar
	Daftar isi
BAB 1	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
	2.1 Tabel
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.2 Tabel
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1 Tabel
BAB V	PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Berdasarkan **fungsi** dan **urusan** pemerintahan yang dilimpahkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara telah diselenggarakan belanja menurut urusan yaitu urusan wajib yang dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijaksanaan dan kumpulan dari kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan 3 (tiga) tahun RKP.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian RPD perangkat Daerah

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2024 dalam mencapai target RKP sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

TABEL 2.1
CAPAIAN KINERJA SKPD s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

KANTOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1				2	3	4	5 (4/3)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Persentase peningkatan penyelesaian konflik sosial	100	50	50
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	50	50
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	50	50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	6	50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	60	60
	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	15	50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15	9	60

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	50	50
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	6	50
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	6	50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	40	40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	1	33.33333333
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kesadaran Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.15	1.15	100

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Minat Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	267	267	100
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35	33	94
	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	100	60	60
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partai politik yang melakukan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	60	60

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5	3	60
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	0	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak dalam penanganan konflik sosial	100	0	0

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	0	0
--	---	--	---	---	---

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri dan memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri serta pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merumuskan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang merupakan penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam upaya mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2019-2024. Adapun visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut:

Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :

“Terwujudnya Masyarakat Demokratis, Partisipatif, Berbudaya yang Berwawasan Kebangsaan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 terdapat program dan kegiatan yang mengalami pergeseran untuk memenuhi program dan kegiatan yang kekurangan anggaran. Namun program dan kegiatan yang mengalami pergeseran merupakan program dan kegiatan pada tahun 2024 yang tidak terlaksana sebagai berikut :

TABEL 3.2
REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

KANTOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
1				2	3	4	5	6	7 = (6-5)	8	9	10
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				Persentase peningkatan penyelesaian konflik sosial	100	100	30,091,020,530	30,091,020,530	0			KESBANGPOL
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	1,004,167,252	1,004,167,252	0			KESBANGPOL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	811,218,582	811,218,582	0			KESBANGPOL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	12	811,218,582	811,218,582	0			KESBANGPOL
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	100	77,458,950	77,458,950	0			KESBANGPOL
		Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	30	8,471,450	8,471,450	0			KESBANGPOL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15	15	68,987,500	68,987,500	0			KESBANGPOL

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	79,609,720	79,609,720	0			KESBANGPOL
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	1,495,000	1,495,000	0			KESBANGPOL
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	78,114,720	78,114,720	0			KESBANGPOL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	35,880,000	35,880,000	0			KESBANGPOL
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	3	35,880,000	35,880,000	0			KESBANGPOL
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kesadaran Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.15	1.15	699,997,150	699,997,150	0			KESBANGPOL

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Minat Pemuda di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	267	267	699,997,150	699,997,150	0			KESBANGPOL
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35	35	699,997,150	699,997,150	0			KESBANGPOL
	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	100	100	27,880,456,228	27,880,456,228	0			KESBANGPOL
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase partai politik yang melakukan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	100	27,880,456,228	27,880,456,228	0			KESBANGPOL

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5	5	27,880,456,228	27,880,456,228	0			KESBANGPOL
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	100	506,399,900	506,399,900	0			KESBANGPOL
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak dalam penanganan konflik sosial	100	100	506,399,900	506,399,900	0			KESBANGPOL

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	1	506,399,900	506,399,900	0			KESBANGPOL
--	---	--	---	---	-------------	-------------	---	--	--	------------

BAP V.

P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah dokumen perencanaan yang memuat tentang pergeseran, penghapusan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif dan kelompok sasaran dalam mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan merupakan sarana untuk mengevaluasi apa yang belum dan sudah dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kantor kesatuan bangsa dan politik, rencana kerja SKPD, diharapkan untuk dapat diperhatikan guna menunjang pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Demikian Rancangan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibuat, untuk dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, JULI 2024
Kepala Kantor,

RAMIN BUHANG, S.Sos
NIP. 196908301992031007